

ANALISIS ANGGARAN KINERJA SEKTOR PUBLIKPADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Oleh
Krismanto Muliadi Manurung ¹⁾
Firda Mauliddina ²⁾
Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2)}

E-mail:

krismanto@gmail.com ¹⁾
firda@gmail.com ²⁾

ABSTRACT

The budget is a statement regarding the estimated performance to be achieved during a certain period of time expressed in financial terms. Thus, the budget is very important for the government to estimate the performance it wants to achieve later. Performance-based budgeting is a budgeting system that is oriented towards organizational output which is closely related to the vision and mission and strategic planning of the organization. The data analysis method used by the writer is descriptive method and deductive method. As for the results of the research that has been carried out, it can be concluded that the financial budget at the North Sumatra Provincial Transportation Office as a whole is good, there are no activities that cannot be carried out regarding the budget and the budget that is prepared is according to what is planned and there is also an excess in the preparation of the budget is caused by various factors, but this does not make the financial budget at the Transportation Agency of North Sumatra Province deteriorate, because the remaining excess budget will go to the regional treasury.

Keywords :Budget, Performance.

ABSTRAK

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Dengan demikian, anggaran merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah untuk mengestimasi kinerja yang ingin dicapai nantinya. Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi dan misi serta perencanaan strategis organisasi. Metode analisa data yang digunakan penulis yaitu metode deskriptif dan metode deduktif. Adapun hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Anggaran keuangan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan sudah baik, tidak ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan mengenai anggaran dan Anggaran yang disusun ada yang sesuai dengan yang direncanakan dan ada juga yang kelebihan dalam penyusunan anggaran yang disebabkan oleh berbagai faktor, tetapi itu tidak membuat anggaran keuangan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara memburuk, karena sisa anggaran yang berlebih akan masuk ke kas daerah.

Kata Kunci : Anggaran, Kinerja

1. PENDAHULUAN

Saat ini pemerintah telah menerapkan sistem penganggaran dengan sistem anggaran berbasis kinerja. Sebelum sistem anggaran berbasis kinerja diberlakukan, pemerintah menggunakan sistem anggaran tradisional, yang mana sistem ini lebih menekankan pada biaya bukan pada hasil/kinerja. Sistem anggaran tradisional ini dengan penyusunan anggaran yang bersifat line item budget, yang mana proses penyusunan anggarannya berdasarkan pada realisasi anggaran tahun sebelumnya, dengan demikian tidak ada perubahan yang signifikan atas anggaran tahun berikutnya.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Dengan demikian, anggaran merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah untuk mengestimasi kinerja yang ingin dicapai nantinya. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Keuangan Negara Pasal 19 ayat (1) dan (2) yang berbunyi dalam rangka penyusunan RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaku pengguna anggaran menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

Akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik memiliki peran utama dengan memberikan informasi Akuntansi yang relevan dan handal kepada pimpinan untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Anggaran atau sejumlah uang yang diperuntukkan untuk dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program dalam organisasi pemerintahan juga perlu direncanakan. Dengan adanya Akuntansi pertanggungjawaban, pimpinan dapat mendelegasikan wewenang dan tanggungjawab ke tingkat manajemen di

bawahnya dengan lebih efisien tanpa memantau secara langsung seluruh kegiatan organisasi.

Organisasi dapat diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Organisasi sebagai suatu sistem kegiatan yang dikoordinasikan secara sadar di antara dua orang atau lebih. Organisasi menggunakan tanggungjawab dan pengambilan keputusan untuk mengarahkan pelaksanaan pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan tahun 2006, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan lagi peraturan mengenai ketentuan penerapan anggaran berbasis kinerja ini melalui Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 13 tahun 2006 dan telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan kemudian diubah lagi dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Didalam peraturan ini disebutkan tentang penyusunan RKA SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dan melihat pentingnya pertanggungjawaban anggaran, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Anggaran Kinerja Sektor Publik Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara".

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik

Anggaran memiliki peran penting dalam organisasi sektor publik, terutama organisasi pemerintahan. Terdapat beberapa pengertian anggaran, yaitu sebagai berikut :

1. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak

dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial.

2. Anggaran adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut.
3. Anggaran sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang.

Tiga definisi anggaran tersebut sengaja penulis sajikan, karena definisi di atas adalah definisi anggaran sering dikutip oleh beberapa penulis lain, Abdul Halim dan Kusufi (2012).

2.1.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik

Anggaran dalam akuntansi berada di dalam lingkup akuntansi manajemen. Mardiasmo (2014) mengidentifikasi beberapa Fungsi anggaran dalam manajemen sektor publik adalah sebagai berikut :

1. Anggaran sebagai alat perencanaan
Bahwa anggaran merupakan alat perencanaan Manajemen untuk mencapai tujuan organisasi sehingga organisasi akan tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan akan dibuat.
2. Anggaran sebagai alat pengendalian
Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*), terlalu rendah (*underspending*), salah sasaran (*missappropriation*) atau adanya penggunaan yang tidak semestinya (*misspending*).
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal
Melalui anggaran organisasi sektor publik dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah, digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Anggaran sebagai alat politik
Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan bagi legislatif

atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tertentu.

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi
Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan sub-organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya.
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja
Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa hasil yang dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.
7. Anggaran sebagai alat motivasi
Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable* atau *demanding but achievable*.
8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik
Fungsi ini hanya berlaku pada organisasi sektor publik, karena pada organisasi swasta anggaran merupakan dokumen rahasia yang tertutup untuk publik. Masyarakat dan elemen masyarakat lainnya nonpemerintah seperti LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan dan organisasi masyarakat lainnya, harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

2.1.3 metode penyusunan anggaran

Ada tiga metode dalam menyusun anggaran biasanya digunakan oleh suatu organisasi, yaitu:

1. *Top down budgeting* adalah metode anggaran yang dilaksanakan oleh organisasi atau perusahaan yang dimulai dari pimpinan perusahaan kepada

bawahannya.

2. *Bottom up budgeting* adalah metode anggaran yang dilaksanakan suatu perusahaan yang dimulai dari bawah kepada atasannya atau pimpinan perusahaan.
3. Gabungan adalah metode anggaran yang dilaksanakan suatu perusahaan dengan menggabungkan dua metode sebelumnya yaitu metode *Top down* dan *Bottom up budgeting*.

2.3 Penelitian Terdahulu

| No | Judul Penelitian dan Tahun | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|---|----------------------------|
| 1. | Analisis Anggaran Kinerja sektor publik Pada Pemerintah Daerah Aceh Selatan. Reza Nanda (2016) | Sama-sama melakukan penelitian tentang Anggaran berbasis kinerja sektor public | Tahun dan objek Penelitian |
| 2. | Penerapan Anggaran Sebagai Alat pengendalian Biaya pada sektor publik Perusahaan Daerah Air Minum Jayapura . Muhammad Fadlilah(2017) | Sama-sama melakukan penelitian tentang penerapan Anggaran Pertanggungjawaban anggaran sebagai alat pengendalian biaya | Tahun dan objek Penelitian |
| 3. | Penerapan anggaran sektor publik dalam Pertanggungjawaban Sebagai Pengendalian Biaya Dinas Perhubungan Manado Andre Mandak (2013) | Sama-sama melakukan penelitian tentang penerapan anggaran sebagai pengendalian Biaya | Tahun dan objek Penelitian |

2.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Anggaran Sektor publik



2.5 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka penulis merumuskan hipotesis dalam penelitian ini bahwa Anggaran Kinerja Sektor Publik pada Dinas Perhubungan Sumatera Utara Belum Efektif.

3. METODE PELAKSANAAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan Sumatera Utara. Jl.Imam Bonjol No.61 Suka Damai,Kecamatan Medan Polonia,Kota Medan Sumatera Utara 20157. Dan rencana penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli –

September 2020.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah laporan anggaran pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

Sampel penelitian ini adalah Laporan Anggaran Keuangan sektor Publik Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2017-2019.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan metode penelitian lapangan (*Field Research*).

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Deskriptif

Dalam penelitian ini metode deskriptif bertujuan untuk mengetahui gambaran sejarah ringkas instansi, struktur organisasi, dan data lain yang berhubungan dengan penelitian.

3.4.2 Deduktif

Pendekatan deduktif sebagian besar datang dalam penelitian kuantitatif di mana peneliti berusaha untuk mengeluarkan kausalitas dan menyajikan analisis statistik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Perusahaan

Departemen Perhubungan telah ada sejak periode awal kemerdekaan Indonesia yang dibentuk berdasarkan periode Kabinet-kabinet Republik Indonesia. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi disusun berawal dari pemikiran strategis tentang nilai-nilai luhur yang di anut / dimiliki oleh seluruh pimpinan dan staf Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan karakteristik ini dari tugas pokok yang diemban oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

Dasar hukum pembentukan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara adalah Peraturan Daerah Sumatera Utara No. 3 Tentang Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, dimana pasal 21 ayat (2) disebutkan bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas

menyelenggarakan sebagai kewenangan pemerintahan dan tugas dekonsentrasi antara lain :

1. Menyiapkan bahan perumusan perencanaan / program dan kebijaksanaan teknis bidang perhubungan.
2. Menyelenggarakan pembina Perhubungan darat, laut, udara, pengawasan dan pengendalian serta pos dan telekomunikasi.
3. Melaksanakan tugas-tugas terkait dengan Perhubungan sesuai ketetapan kepala daerah Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 060.255k Tahun 2002 Tentang Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Serta Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

4.2 Visi dan Misi

Visi

Visi Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara adalah mewujudkan penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam upaya menciptakan masyarakat Sumatera Utara yang beriman, maju, mandiri, mapan dan berkeadilan di dalam kebhinekaan yang di dukung tata pemerintahan yang baik. Handal meliputi : Aman, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Misi

Misi dari Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara adalah membangun dan mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang bertumbuh pada pertanian, agroindustri, pariwisata dan sektor-sektor unggulan serta mengembangkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan cara :

1. Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan (rekondisi/ survival),
2. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang

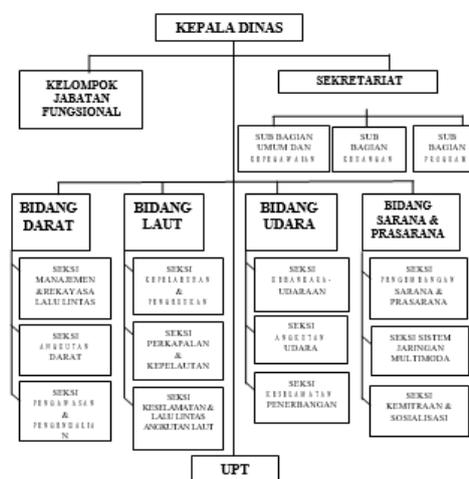
perhubungan dan menegakkan hukum secara konsisten (restrukturisasi dan reposisi),

3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan perhubungan,
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan jasa perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberi nilai tambah.

4.3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

4.4 Analisis Hasil Penelitian

4.4.1 Penyusunan Anggaran Pada Dinas Perhubungan



Penyusunan anggaran pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dimulai dengan menyusun rencana biaya didalam menjalankan aktivitas karena sangat penting dalam suatu pencapaian dalam pemerintahan ,maka masing-masing membuat usulan anggaran,sehingga lebih terperinci dalam program-program yang akan dilaksanakan.Setiap bagian dalam penyusunan anggaran berdasarkan biaya historis yaitu anggaran disusun berdasarkan catatan-catatan realisasi anggaran pada tahun sebelumnya.hal ini dilakukan akan melibatkan keseluruhan bagian dalam penyusunan.

Dalam pelaksanaan penyusunan anggaran Dinas Perhubungan Sumatera Utara memakai pendekatan kepada setiap kepala bagian yang terdapat di Dinas Perhubungan Sumatera Utara hal ini dilakukan dengan harapan anggaran akan

terperinci dan digunakan dengan semaksimal mungkin.

Anggaran pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara berupa biaya belanja. Belanja terbagi atas dua jenis yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

1. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak secara langsung terkait dengan produktivitas atau tujuan organisasi. Biaya Gaji dan Tunjangan, Biaya Tambahan Penghasilan PNS dan Biaya Insentif Pajak dan Retribusi Daerah.

2. Belanja langsung

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan produktivitas kegiatan atau terkait langsung dengan tujuan organisasi.

Hal ini tidak lepas dari bertambahnya alokasi Anggaran Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang berdampak pada peningkatan alokasi dana untuk kegiatan tersebut sehingga tingkat realisasi dari setiap kegiatan anggaran tentunya akan mempengaruhi tingkat realisasi total dana anggaran kinerja tahunan secara keseluruhan dari dapat kita lihat (Belanja Langsung + Belanja Tidak Langsung) Pagu Rp. 75.672.010.400,- Realisasi Rp.67.185.289.829,- Sisa anggaran Rp. 8.486.720.571,- serta persentasenya 89% saat tahun 2017.

Hal ini tidak lepas dari bertambahnya alokasi Anggaran Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang berdampak pada peningkatan alokasi dana untuk kegiatan tersebut sehingga tingkat realisasi dari setiap kegiatan anggaran tentunya akan mempengaruhi tingkat realisasi total dana anggaran kinerja tahunan secara keseluruhan dari dapat kita lihat (Belanja Langsung + Belanja Tidak Langsung) Pagu Rp. 74.894.800.700,- Realisasi Rp.68.077.934.826,- Sisa anggaran Rp.6.816.865.874,- serta persentasenya 91% saat tahun 2018.

Dari uraian di atas, banyak mata

anggaran yang mengalami kelebihan anggaran Kelebihan atau sisa anggaran tersebut seluruhnya dikembalikan kedalam kas daerah. Tetapi ada satu jenis biaya yang merealisasikan anggarannya sesuai dengan yang telah dianggarkan, tidak mengalami kekurangan anggaran atau kelebihan anggaran yaitu: Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pada biaya ini jumlah anggaran yang terealisasi sama dengan jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 170.000.000,-. hal ini tidak lepas dari bertambahnya alokasi Anggaran Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang berdampak pada peningkatan alokasi dana untuk kegiatan tersebut sehingga tingkat realisasi dari setiap kegiatan anggaran tentunya akan mempengaruhi tingkat realisasi total dana anggaran kinerja tahunan secara keseluruhan dari dapat kita lihat (Belanja Langsung + Belanja Tidak Langsung) Pagu Rp.79.720.750.700,- Realisasi Rp.75.037.934.826,- Sisa anggaran Rp.4.682.815.874,- serta persentasenya 94% saat tahun 2019.

4.5 Interpretasi hasil

Tabel 4.5 Anggaran Keuangan Dinas Perhubungan Tahun 2017-2019.

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | Persentase |
|-------|------------------|-------------------|---------------|------------|
| 2017 | 75.672.010.400 | 67.185.289.829 | 8.486.720.571 | 89% |
| 2018 | 74.894.800.700 | 68.077.934.826 | 6.816.865.874 | 91% |
| 2019 | 79.720.750.700 | 75.037.934.826 | 4.682.815.874 | 94% |

Sumber : Sub bagian Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

Anggaran belanja pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya selalu berubah dan cenderung mengalami peningkatan jumlah anggaran. Adapun analisis yang dilakukan penulis dalam anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, memaparkan laporan anggaran secara keseluruhan mulai dari tahun 2017,2018, dan 2019 sebagai berikut :

Tahun 2017 anggaran sebesar

Rp.75.672.010.400,- Realisasi
 Rp.67.185.289.829,- pencapaian
 persentasenya 89% dikatakan dengan
 pencapaian kinerja sangat baik. berarti
 Manajemen Dinas Perhubungan Provinsi
 Sumatera Utara dapat mengalokasikan
 anggaran dengan efektif dan efisien.
 Tahun 2018 anggaran sebesar Rp.
 74.894.800.700,- namun anggaran ini
 mengalami penurunan sebesar
 Rp.777.209.700,- dibandingkan dengan
 tahun 2017, Realisasi
 Rp.68.077.934.826,- sedangkan
 persentasenya 91% dikatakan dengan
 pencapaian kinerja sangat baik. Mengapa
 anggaran tahun 2018 menurun? hal ini
 terjadi karena pada tahun 2018 Dinas
 Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
 tidak melakukan program Pembangunan
 serta pemeliharaan bangunan, Sarana dan
 Prasarana Dinas Perhubungan seperti
 tahun 2017 dan 2019.
 Tahun 2019 anggaran sebesar
 Rp.79.720.750.700,- Realisasinya
 Rp.75.037.934.826,- persentasenya 94%
 dengan pencapaian kinerja Sangat baik.
 peningkatan realisasi dari tahun 2019 ini
 menunjukan bahwa tingkat penggunaan
 anggaran tersebut sangat efisien dan
 efektif.

Dari hasil analisis perbandingan diatas,
 dapat dilihat bahwa setiap tahun nya
 mengalami kenaikan dan penurunan
 anggaran maupun realisasinya. hal ini
 tidak lepas dari bertambahnya alokasi
 Anggaran Kinerja,serta adanya anggaran
 yang tidak digunakan seperti
 pembangunan atau pemeliharaan sarana
 dan prasarana tahunan pada Dinas
 Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
 tingkat realisasi dari setiap kegiatan
 anggaran tentunya akan mempengaruhi
 tingkat realisasi total dana anggaran
 kinerja tahunan secara keseluruhan dari
 tahun 2017- 2019, sehingga perlu adanya
 hal kebijaksanaan dalam penyusunan
 anggaran, supaya Dinas Perhubungan agar
 mampu memperhitungkan estimasi-
 estimasi kejadian di masa yang akan
 datang, sehingga realisasi penggunaan

anggaran tersebut efisien dan efektif.

5. SIMPULAN

Penelitian yang dilakukan di Dinas
 Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
 bertujuan, untuk mengetahui prosedur
 penyampaian anggaran kepada
 pemerintah, pusat dan mengetahui hasil
 evaluasi penerapan anggaran. Berdasarkan
 hasil penelitian di Dinas Perhubungan
 Provinsi Sumatera Utara maka dapat
 disimpulkan sebagai berikut:

1. Anggaran keuangan pada Dinas
 Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
 secara keseluruhan sudah baik, tidak ada
 kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan
 mengenai anggaran.
2. Anggaran yang disusun ada yang sesuai
 dengan yang direncanakan dan ada juga
 yang kelebihan dalam penyusunan
 anggaran yang disebabkan oleh berbagai
 faktor, tetapi itu tidak membuat anggaran
 keuangan pada Dinas Perhubungan
 Provinsi Sumatera Utara memburuk,
 karena sisa anggaran yang berlebih akan
 masuk ke kas daerah.

Saran

Adapun saran yang dapat peneliti
 kemukakan pada Dinas Perhubungan
 Provinsi Sumatera Utara yaitu:

1. Mengingat pentingnya peranan anggaran,
 sebaiknya Dinas Perhubungan Provinsi
 Sumatera Utara dalam menyusun
 anggarannya dapat lebih teliti khususnya
 pada laporan keuangan sehingga anggaran
 benar-benar dapat direalisasikan seefektif
 mungkin, tidak kekurangan dan tidak
 kelebihan.
2. Manajemen Dinas Perhubungan Provinsi
 Sumatera Utara diharapkan dapat
 mempertahankan kinerja instansi yang
 sudah baik, dan dapat meningkatkan
 kinerja instansi yang belum baik dalam
 mengelola anggaran yang tersedia.
3. Didalam Biaya Insentif Pajak dan Daerah,
 Diharapkan manajemen Dinas
 Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
 dapat meningkatkan lagi kinerja instansi
 dalam mengelola anggaran agar sesuai
 dengan capaian kinerja yang telah

direncanakan sebelumnya.

4. Berdasarkan analisis pada Biaya Honorium PNS, tingkat pencapaian kinerja instansi dalam mengelola anggaran masih Cukup Baik, oleh karenanya diharapkan kepada manajemen instansi agar lebih teliti lagi dalam mengelola anggaran yang telah diberikan agar pencapaian kinerja termasuk kedalam kategori sangat baik.
5. Didalam pengelolaan anggaran pada Biaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Manajemen Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara cukup baik karena Pencapaian kinerja perusahaan masih 65%, jadi diharapkan kepada manajemen Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara agar dapat meningkatkan lagi tingkat pencapaian kinerja ditahun-tahun berikutnya.